

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kelemahan strategi pembangunan ekonomi di masa lalu dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, telah menimbulkan berbagai persoalan yang sangat parah dalam perekonomian Indonesia. Masalah kemiskinan, pengangguran, pendapatan yang rendah, ketimpangan ekonomi, ketahanan pangan yang labil, utang luar negeri yang besar, kemerosotan mutu lingkungan hidup dan ketertinggalan perekonomian daerah, merupakan sederetan masalah ekonomi yang sedang melilit perekonomian Indonesia. Untuk memecahkan masalah ekonomi yang begitu kompleks, Indonesia memerlukan penajaman (*focusing*) strategi pembangunan ekonomi yang dapat diharapkan mampu memberi solusi atas masalah-masalah yang ada, tanpa menimbulkan masalah baru. (*Bungaran Saragih, 2001:2*).

Ketidakseimbangan pembangunan wilayah merupakan salah satu fenomena penyumbang masalah tersebut diatas. Ketidakseimbangan pembangunan wilayah ini tidak hanya terjadi secara nasional dimana kemajuan pembangunan yang dicapai di Pulau Jawa sangat berbeda dengan kemajuan pembangunan di luar Pulau Jawa. Di Provinsi Jawa Barat kondisinya hampir serupa dengan kondisi nasional. Ketidakseimbangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat memiliki disparitas yang tinggi. Wilayah Jawa Barat yang terbagi atas wilayah Bandung Raya atau Wilayah Priangan yang terdiri atas kabupaten/kota: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang.

Wilayah Priangan Timur yang terdiri dari : Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Wilayah Ciayumajakuning, yang terdiri atas Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan, Wilayah Priangan Barat yang terdiri dari, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang. Wilayah ex Karesidenan Bogor terdiri dari: Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur. Jadi ada 26 wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat yang setiap kabupaten/kota tersebut memiliki kemajuan pembangunan yang berbeda apabila dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang meliputi indeks daya beli, indeks kesehatan dan indeks pendidikan, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Data indeks pembangunan manusia propinsi Jawa Barat tahun 2004-2006*)

No.	Kabupaten/Kota	2004	2005	2006
1.	Kab.Bogor	68,10	68,99	69,79
2.	Kab. Sukabumi	67,56	68,54	69,04
3.	Kab. Cianjur	66,18	66,79	67,44
4.	Kab. Bandung	68,52	69,16	70,41
5.	Kab. Garut	66,31	67,03	68,61
6.	Kab. Tasikmalaya	68,46	69,08	69,74
7.	Kab. Ciamis**	70,89	71,08	71,95
8.	Kab. Kuningan	68,00	68,80	69,17
9.	Kab. Cirebon	63,97	64,58	65,51
10.	Kab. Majalengka	68,01	68,52	68,81
11.	Kab. Sumedang	70,65	71,40	71,66
12.	Kab. Indramayu	63,24	64,48	65,72
13.	Kab. Subang	68,20	68,47	69,06
14.	Kab. Purwakarta	68,86	69,52	69,85
15.	Kab. Karawang	65,04	66,35	66,95
16.	Kab. Bekasi	73,78	73,92	71,08
17.	Kota Bogor	74,64	74,94	75,09
18.	Kota Sukabumi	73,96	74,58	75,09
19.	Kota Bandung	77,17	77,42	77,48
20.	Kota Cirebon	71,92	72,52	73,05
21.	Kota Bekasi	74,95	75,48	75,65
22.	Kota Depok	76,85	77,81	77,97
23.	Kota Cimahi	73,83	75,16	75,25
24.	Kota Tasikmalaya	71,05	71,62	72,33
25.	Kota Banjar**	71,52	71,82	71,94
26.	Kab. Bandung Barat	na	na	na
	Jawa Barat	68,36	69,35	70,28

*) *Angka Regional*

***) *Perbedaan Komponen Daya Beli*

Sumber : Kompilasi data kabupaten/kota, 2007

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang menggunakan paradigma "*Human Centered Development*" (lihat Human Centered Development). Ada tiga parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, antara lain : (1) derajat kesehatan dan panjangnya umur yang terbaca dari angka harapan hidup (*Life Expectancy Rate*); (2) pendidikan yang diukur dari angka melek huruf rata-rata dan lamanya sekolah; (3) pendapatan yang diukur dengan daya beli masyarakat. (*H. Faesal Tamin, 1997*).

Pengangguran merupakan masalah tersendiri bagi Propinsi Jawa Barat . Untuk melihat Angkatan Kerja di Jawa Barat dapat dilihat dari tabel-tabel berikut:

Tabel 1.2
Penduduk berumur 10 tahun ke atas Kota Bandung menurut jenis kegiatan utama seminggu yang lalu (Orang) 2005*

Kota	Jenis Kegiatan			
	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Mencari pekerjaan	Jumlah	Persentase Penduduk yang Mencari Pekerjaan
Kota Bandung	878 590	148 422	1 027 012	14.45
Jawa Barat	15 011 002	2 029 082	17 040 084	11.91

*) Pada tahun 2005, Kota Bandung memiliki penduduk yang bekerja dengan jumlah 878 590 orang, sedangkan di Jawa Barat berjumlah 15 011 002 orang. Prosentase penduduk yang bekerja di Kota Bandung adalah

sebesar 5.85% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat.

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2005, BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.3
Penduduk berumur 10 tahun ke atas Kota Bandung menurut jenis kegiatan utama seminggu yang lalu
(Orang)
2006*)

Kota	Jenis Kegiatan			
	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Mencari pekerjaan	Jumlah	Persentase Penduduk yang Mencari Pekerjaan
Kota Bandung	915 120	134 992	1 050 112	12,86
Jawa Barat	15 441 639	1 898 954	17 340 593	10,95

*) Pada tahun 2006, Kota Bandung memiliki penduduk yang bekerja dengan jumlah 915.120 orang, sedangkan di Jawa Barat berjumlah 15.441.639 orang. Prosentase penduduk yang bekerja di Kota Bandung terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada tahun 2005 dan 2006 adalah sebesar 5.85% dan 5.93%.

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2006, BPS Provinsi Jawa Barat

Tabel 1.4
Penduduk berumur 10 tahun ke atas Kota Bandung menurut jenis
kegiatan utama seminggu yang lalu
(Orang)
2007*)

Kota	Jenis Kegiatan			
	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Persentase Penduduk yang Mencari Pekerjaan
Kota Bandung	915 047	180 569	1 095 616	16,48
Jawa Barat	15 853 822	2 386 214	18 240 036	13,08

*) Pada tahun 2007, Kota Bandung memiliki penduduk yang bekerja dengan jumlah 915.047 orang, sedangkan di Jawa Barat berjumlah 15.853.822 orang. Prosentase penduduk yang bekerja di Kota Bandung terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Barat pada tahun 2005, 2006, dan 2007 adalah sebesar 5.85%, 5.93%, dan 5.77%.

Sumber : Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Nasional Agustus 2007 di Provinsi Jawa Barat

Untuk pembagian kelompok industri mengikuti Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Lapangan usaha yang sudah baku secara internasional, yang disebut dengan *International Standard Industrial Clasification (ISIC)*. ISIC ini kemudian diadopsi Indonesia, dan dikenal dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia ini meliputi : pertanian, pertambangan, industri pengolahan, industri gas dan air minum, kontruksi, perdagangan, perhubungan, keuangan dan bank, jasa-jasa lain.

Sampai saat ini, BPS telah menerbitkan empat versi klasifikasi lapangan usaha. Tiga versi Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang diterbitkan berturut-turut pada tahun 1977, 1983, dan 1990 disusun berdasarkan *International Standard Industrial Classification of All Economics Activities* (ISIC). Versi terakhir diterbitkan BPS pada tahun 1997. KLUI versi terakhir ini kemudian disempurnakan menjadi KBLI 2000.

Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional mencatat hingga Oktober 2006 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 11,1 juta orang. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama jumlah pengangguran, yaitu 3,9 juta orang.

Tingkat pengangguran di Jawa Barat, terutama di Kota Bandung, masih sangat tinggi. Pada tahun 2007, jumlah orang yang mencari pekerjaan di Kota Bandung sebesar 180.569 orang atau sebesar 16,48 % dari jumlah angkatan kerja di Kota Bandung. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat sebesar 2.386.214 orang atau 13,08%. Pemicunya adalah angka urbanisasi yang tinggi, serta minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia karena belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang sangat tinggi.

Sejak tahun 2004 angka pengangguran di Bandung terus meningkat., Dari beberapa tabel penduduk dan tenaga kerja di atas terlihat jumlah pengangguran terbuka di Kota Bandung tahun 2005-2007, yaitu 148.422 orang (tahun 2005), 134.992 orang (tahun 2006) dan 180.569 orang (tahun 2007). Penyerapan tenaga kerja terbilang kecil, hanya sekitar 10.000-15.000 orang. Adapun jumlah angkatan kerja terus meningkat sekitar 20.000-50.000 orang per tahun.

Peningkatan itu dipicu berbagai kebijakan pemerintah yang menyebabkan tutupnya sejumlah perusahaan pengolahan di Kota Bandung, seperti pabrik tekstil

yang padat karya. Kebijakan makro secara nasional, seperti kenaikan harga minyak, menyebabkan sektor industri banyak yang kolaps. Akibatnya, pengangguran itu lebih banyak tercipta dari pemutusan hubungan kerja.

Rendahnya tingkat investasi di Bandung juga menghambat penyerapan tenaga kerja. Padahal, investasi diharapkan bisa menjadi peluang dibukanya lapangan pekerjaan baru. Selain itu, mediasi perbankan belum membuahkan hasil nyata. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia belum mendapatkan tanggapan positif karena suku bunga kredit masih tinggi.

Pada tahun 2007, sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbanyak di Bandung, yaitu sekitar 70 persen dari angkatan kerja yang ada. Salah satunya ialah peningkatan jumlah pedagang informal, yaitu pedagang kaki lima. Terlebih lagi, setelah dibuka Jalan Tol Cipularang, pertumbuhan ekonomi Bandung sangat bergantung pada sektor PHR. (anonim, 2007).

Dalam kondisi sulit seperti ini, guna menjamin terciptanya fundamental ekonomi yang solid, Pemerintah provinsi Jawa Barat, terutama Kota Bandung, harus mampu mengidentifikasi pilihan strategi untuk dapat menggerakkan perekonomiannya melalui industri basis (basis industri), khususnya untuk Kota Bandung, dengan cepat. Mengacu pada berbagai permasalahan tersebut di atas, kajian tentang Ketidakseimbangan Pembangunan Wilayah di Kota Bandung: Pendekatan Location Quotient dari aspek Tenaga Kerja, diharapkan dapat memberikan rekomendasi prioritas pembangunan wilayah Kota Bandung untuk masa yang akan datang. Alat analisa Location Quotient (LQ) akan mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Bandung.

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nilai LQ di Kota Bandung dalam tiga tahun (2005-2007)?
2. Bagaimana kluster industri di Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai LQ (*location quotients*) sehingga dapat melihat spesialisasi industri di Kota Bandung terhadap Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kluster industri (*industry cluster*), sehingga dapat diketahui :
 - a. Perbandingan industri dengan tenaga kerja
 - b. Jumlah (input) industri atau infrastruktur yang dibutuhkan
 - c. Mengetahui produksi dari suatu industri
 - d. Mengetahui produk apa yang dibutuhkan

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi dan pemerintah

Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Bandung dalam rangka meningkatkan minat investasi, peningkatan pendapatan penduduk, penciptaan lapangan kerja, mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya

lainnya; serta mendorong berkembangnya minat untuk dilakukannya studi terhadap perekonomian regional dan lokal kabupaten dan kota.

2. Manfaat bagi praktisi bisnis

Sedangkan manfaat perencanaan ekonomi daerah bagi praktisi di lapangan, para pelaku ekonomi dan siapa saja yang terkait dengan pembangunan ekonomi daerah di Kota Bandung, adalah bahwa hasil-hasil studi ini akan bermanfaat sebagai *guidance* (petunjuk) dalam upaya mengisi pembangunan perekonomian daerah Kota Bandung.